

## **HEGEMONI DAN TRANSFORMASI: ANALISIS KOMPREHENSIF ISU GENDER DALAM DINAMIKA GLOBAL ABAD KE-21**

**Putu Putri Dena Laksmi<sup>1</sup> I Wayan Lasmawan<sup>2</sup> Desak Putu Parmiti<sup>3</sup>**

Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha

[putridena96@gmail.com](mailto:putridena96@gmail.com)

---

<b>Article Info</b>	<b>Abstract (10 Pt)</b>
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received Date, month, Year Publish Date, month, Year</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b></p> <p>Hegemony, Gender Transformation, Patriarchy, Intersectionality, Global Dynamics.</p>	<p>Gender inequality remains one of the most pressing challenges on the global development agenda. Although significant progress has been achieved through the MDGs and SDGs, the gap between men and women in economic access, political representation, and personal security remains very wide. This study aims to explore the sociological roots of gender inequality, its impact on the global economy, and how the currents of globalization and digitalization create both new opportunities and threats to gender justice. The method used in this study is a comprehensive analysis through an in-depth literature review of patriarchal structures, intersectionality theory, and the dynamics of gender issues in the 21st century. The analysis covers the mechanisms of perpetuating patriarchy through the institutions of family, education, and religion, as well as its manifestations in the capitalist economy and digital space. The results show that patriarchal hegemony remains a structure that is difficult to dismantle and is transforming into more complex forms in the digital era, such as technology-mediated gender-based violence. The gender wage gap and unpaid care work continue to hinder global economic potential, while women's representation in strategic decision-making remains far from targets. Intersectionality theory emphasizes that the discrimination experienced by women overlaps with issues of race, class, and colonialism, thus requiring non-monolithic solutions. This study concludes that gender transformation is not merely a moral issue but a prerequisite for the progress of civilization, demanding legal reform, inclusive education, and cross-national commitment to deconstruct oppressive hegemonic structures.</p>
<hr/> <p><b>Info Artikel</b></p> <p><b>Article history:</b></p> <p>Diterima Tanggal Bulan tahun Publis Tanggal, bulan tahun</p>	<hr/> <p><b>ABSTRACT (10 PT)</b></p> <p>Ketidaksetaraan gender tetap menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam agenda pembangunan global. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai melalui MDGs dan SDGs, jurang antara laki-laki dan perempuan dalam akses ekonomi, representasi politik, dan keamanan pribadi masih sangat lebar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi akar sosiologis ketidaksetaraan gender, dampaknya terhadap ekonomi global, serta bagaimana arus globalisasi dan digitalisasi menciptakan peluang sekaligus ancaman baru bagi keadilan gender. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis komprehensif melalui tinjauan literatur mendalam terhadap struktur patriarki, teori interseksionalitas, dan dinamika isu gender di abad ke-21. Analisis mencakup mekanisme pelanggaran patriarki melalui institusi keluarga, pendidikan, agama, hingga manifestasinya dalam ekonomi kapitalis dan ruang digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa hegemoni patriarki tetap menjadi struktur yang sulit diruntuhkan dan bertransformasi menjadi bentuk yang lebih kompleks di era digital, seperti kekerasan berbasis gender yang dimediasi teknologi. Kesenjangan upah gender dan beban kerja domestik tak berbayar (unpaid care work) terus menghambat potensi ekonomi global, sementara representasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih jauh dari target. Teori interseksionalitas menegaskan bahwa diskriminasi yang dialami perempuan bersifat tumpang tindih dengan isu ras, kelas, dan kolonialisme, sehingga memerlukan solusi yang tidak monolitik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi gender bukan</p>

---

---

sekadar masalah moral, melainkan prasyarat bagi kemajuan peradaban yang menuntut reformasi hukum, pendidikan inklusif, dan komitmen lintas negara untuk mendekonstruksi struktur hegemoni yang menindas.

---

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)*



---

**Corresponding Author:**

Putu Putri Dena Laksmi,  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Email: [putridena96@gmail.com](mailto:putridena96@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Di ambang dekade ketiga abad ke-21, dunia menyaksikan kontradiksi yang tajam dalam perkembangan hak asasi manusia. Di satu sisi, globalisasi dan kemajuan teknologi menjanjikan demokratisasi akses dan kesempatan bagi semua individu tanpa memandang identitas. Namun, di sisi lain, data global menunjukkan bahwa hegemoni patriarki tetap menjadi struktur yang paling sulit diruntuhkan, bahkan ia bertransformasi menjadi bentuk-bentuk baru yang lebih kompleks di era digital. Isu gender bukan lagi sekadar narasi marginal tentang hak-hak perempuan, melainkan menjadi determinan utama dalam stabilitas ekonomi, keamanan internasional, dan keberlanjutan ekologi global. Kajian mendalam mengenai topik ini menjadi sangat mendesak setidaknya karena tiga alasan fundamental: Pertama, kegagalan sistemik dalam distribusi kesejahteraan ekonomi. Meskipun berbagai agenda internasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-5 telah dicanangkan, laporan World Economic Forum (2024) memperingatkan bahwa dengan kecepatan kemajuan saat ini, dunia membutuhkan waktu setidaknya 134 tahun lagi untuk mencapai kesetaraan gender penuh. Hegemoni gender menciptakan "feminisasi kemiskinan," di mana perempuan di seluruh dunia menanggung beban kerja domestik tak dibayar (unpaid care work) yang menjadi fondasi ekonomi kapitalis namun tidak pernah diakui secara finansial. Tanpa analisis komprehensif, kebijakan ekonomi global akan terus mengabaikan potensi triliunan dolar yang hilang akibat kesenjangan partisipasi tenaga kerja.

Kedua, adanya fenomena "Shadow Pandemic" dan kekerasan struktural. Dinamika global abad ke-21 membawa ancaman baru berupa kekerasan berbasis gender yang dimediasi teknologi. Dari pelecehan siber hingga perdagangan manusia yang terorganisir secara digital, tubuh perempuan tetap menjadi medan tempur bagi kekuasaan. Krisis global, mulai dari pandemi COVID-19 hingga perubahan iklim, telah memperparah kerentanan ini. Kajian mendalam diperlukan untuk membedah bagaimana kebijakan perlindungan sering kali gagal karena hanya menyentuh gejala permukaan tanpa membongkar akar budaya kekerasan yang tertanam dalam hegemoni maskulinitas. Ketiga, urgensi representasi dalam pengambilan keputusan global. Dunia saat ini menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim dan krisis energi yang membutuhkan perspektif inklusif. Kepemimpinan global yang masih didominasi secara hegemonik oleh perspektif laki-laki cenderung menghasilkan solusi yang teknokratis dan sering kali mengabaikan aspek kepedulian sosial serta kelestarian jangka panjang. Transformasi gender bukan hanya tentang "menambahkan perempuan" ke dalam sistem, melainkan tentang mengubah cara sistem itu bekerja melalui lensa feminisme dan interseksionalitas.

Oleh karena itu, kajian ini tidak boleh lagi dipandang sebagai studi tambahan atau pelengkap. Ia adalah keharusan intelektual untuk memahami bagaimana kekuasaan beroperasi di abad ke-21. Tanpa analisis yang komprehensif, upaya transformasi hanya akan menjadi jargon kosmetik,

sementara struktur hegemoni yang menindas akan terus mereproduksi ketidakadilan yang menghambat kemajuan peradaban manusia secara utuh.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Secara spesifik, metode yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) Penelitian dilakukan dengan melakukan tinjauan literatur mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan isu gender dan dinamika global.

Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang mencakup; 1) Karya teoretis klasik dan kontemporer: Menganalisis pemikiran tokoh-tokoh seperti Simone de Beauvoir mengenai konstruksi sosial, Raewyn Connell tentang *Hegemonic Masculinity*, dan Sylvia Walby mengenai struktur patriarki. 2) Laporan Global: Mengacu pada data mutakhir dari lembaga internasional seperti *World Economic Forum* (2024), PBB (UN Women), dan dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kerangka Analisis dalam penelitian ini menggunakan dua pisau analisis utama: Analisis struktur patriarki membedah mekanisme pelanggaran dominasi laki-laki melalui institusi keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi. Teori interseksionalitas menggunakan kerangka kerja Kimberlé Crenshaw untuk memahami bagaimana identitas sosial yang bertindih (ras, kelas, dan jantina) menciptakan moda diskriminasi yang unik. Teknik analisis data dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari fenomena global seperti Gender Wage Gap, Unpaid Care Work, hingga fenomena Shadow Pandemic di era digital.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 HASIL PENELITIAN

#### 3.1.1 Struktur Patriarki dan Budaya

Patriarki sebagai sistem sosial menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Secara ontologis, banyak kebudayaan yang mengonstruksi peran domestik bagi perempuan dan peran publik bagi laki-laki. Konstruksi ini diperkuat melalui institusi keluarga, pendidikan, dan agama. Kata "patriarki" secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *patriarkhes*, yang berarti "tata tertib ayah". Namun, dalam diskursus kontemporer, patriarki bukan sekadar dominasi individu ayah dalam keluarga, melainkan sebuah sistem struktur sosial dan praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan (Walby, 1990). Tinjauan ini memandang patriarki sebagai sebuah "sistem" yang meresap ke dalam sumsum kebudayaan, yang mendikte bagaimana sumber daya didistribusikan, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana identitas gender dikonstruksi sejak lahir hingga liang lahat. Salah satu perdebatan mendasar dalam tinjauan pustaka ini adalah asal-usul patriarki. Terdapat dua pandangan besar:

- **Pandangan Esensialis:** Menganggap patriarki sebagai konsekuensi logis dari perbedaan biologis (kekuatan fisik laki-laki). Namun, pandangan ini banyak disanggah oleh antropolog modern.
- **Pandangan Konstruksionis:** Menegaskan bahwa patriarki adalah produk budaya. Simone de Beauvoir dalam karyanya *The Second Sex* (1949) menyatakan, "*One is not born, but rather becomes, a woman.*" Pernyataan ini menjadi fondasi ontologis bahwa peran gender yang kaku dalam struktur patriarki adalah hasil dari sosialisasi budaya yang berkelanjutan, bukan takdir alamiah.

### 3.1.2 Mekanisme Pelanggaran Patriarki melalui Institusi Budaya

Keluarga sering kali menjadi tempat pertama di mana struktur patriarki diperkenalkan. Melalui pembagian kerja domestik, anak-anak belajar bahwa ruang privat adalah wilayah feminin dan ruang publik adalah wilayah maskulin. Pustaka sosiologi menunjukkan bahwa pola asuh yang membedakan mainan, pakaian, dan tanggung jawab berdasarkan gender adalah batu bata pertama dalam membangun gedung patriarki di dalam pikiran individu. Meskipun sekolah secara formal mengajarkan kesetaraan, "kurikulum tersembunyi" sering kali melanggar stereotip gender. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa buku teks sering kali menggambarkan laki-laki sebagai penemu, pemimpin, dan petualang, sementara perempuan digambarkan dalam peran pendukung atau domestik. Hal ini membatasi aspirasi dan harga diri siswa sejak usia dini. Banyak sistem budaya menggunakan narasi keagamaan atau mitologi untuk menjustifikasi subordinasi perempuan. Penafsiran teks suci yang bias gender sering kali dijadikan alat legitimasi untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan publik. Terdapat hubungan simbiotik antara patriarki dan kapitalisme. Literasi ekonomi feminis menyoroti konsep *Unpaid Care Work* (kerja perawatan tak berbayar). Struktur ekonomi global sangat bergantung pada kerja domestik perempuan (memasak, mengasuh anak, mengurus rumah) yang tidak dihargai secara finansial. Jika kerja ini dihitung secara moneter, nilainya mencapai triliunan dolar setiap tahunnya. Patriarki memberikan "subsidi" bagi kapitalisme dengan memastikan bahwa tenaga kerja (laki-laki) dirawat di rumah tanpa biaya tambahan bagi sistem industri. Pustaka modern mengenai gender menekankan bahwa patriarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menindas laki-laki melalui konsep *Hegemonic Masculinity* (Raewyn Connell). Laki-laki dituntut untuk selalu kuat, tidak boleh emosional, dan harus menjadi pencari nafkah tunggal. Hal ini menyebabkan beban psikologis, angka bunuh diri yang lebih tinggi pada laki-laki, serta kecenderungan perilaku berisiko untuk membuktikan "kejantanan". Dalam struktur patriarki, kekerasan sering kali digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan status quo. Sylvia Walby mengidentifikasi kekerasan sebagai salah satu dari enam struktur patriarki. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja, hingga objektifikasi perempuan di media adalah cara-cara sistemik untuk mengingatkan perempuan agar tetap berada dalam posisi subordinat. Tinjauan ini harus menyertakan teori interseksionalitas Kimberlé Crenshaw. Pengalaman perempuan dalam struktur patriarki tidaklah seragam. Seorang perempuan kulit putih kaya di Eropa mengalami patriarki secara berbeda dengan seorang perempuan buruh tani di Indonesia. Ada lapisan penindasan lain seperti ras, kelas, dan kolonialisme yang berkelindan dengan patriarki, menciptakan bentuk-bentuk marginalisasi yang unik. Era digital membawa tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, media sosial memperkuat objektifikasi perempuan dan melahirkan bentuk baru patriarki digital (*online gender-based violence*). Di sisi lain, gerakan global seperti #MeToo menunjukkan kekuatan solidaritas digital dalam menggugat struktur kekuasaan yang mapan selama berabad-abad. Dekonstruksi patriarki memerlukan perubahan budaya yang radikal. Literasi gender harus menjadi bagian integral dari pendidikan nasional. Kebijakan seperti cuti ayah (*paternity leave*), keterwakilan perempuan di parlemen, dan pengakuan ekonomi atas kerja domestik adalah langkah-langkah menuju peruntahan struktur ini. Patriarki adalah struktur yang sangat lentur; ia mampu beradaptasi dengan zaman, dari era agraris hingga era kecerdasan buatan. Namun, karena ia adalah konstruksi budaya, maka ia bukan sesuatu yang mustahil untuk diubah. Memahami akar patriarki dalam budaya adalah langkah awal untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil, di mana kemanusiaan tidak lagi dibatasi oleh kotak-kotak gender yang sempit.

### 3.1.3 Teori Interseksionalitas

Dalam bahasan global, kita tidak bisa melihat gender secara tunggal. Teori interseksionalitas yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw menjelaskan bahwa diskriminasi yang dialami perempuan di Global South (Negara Berkembang) berbeda dengan perempuan di Global North (Negara Maju) karena tumpang tindih dengan isu ras, kelas ekonomi, dan kolonialisme. Selama berdekad-dekad, analisis sosial mengenai diskriminasi cenderung bersifat "monolitik"—yaitu melihat penindasan hanya dari satu sudut, sama ada jantina sahaja atau kaum sahaja. Teori Interseksionalitas hadir untuk memecahkan cara fikir linear ini. Interseksionalitas adalah kerangka kerja analitik yang digunakan untuk memahami bagaimana pelbagai identiti sosial dan politik (seperti jantina, kaum, kelas, kasta, agama, kecacatan, dan orientasi seksual) bergabung untuk mewujudkan mod diskriminasi dan kelebihan yang unik. Tinjauan ini akan membincangkan bahawa pengalaman seorang wanita kulit hitam dalam kemiskinan tidak boleh difahami hanya sebagai jumlah "seksisme + rasisme + kelas", tetapi merupakan satu bentuk penindasan kualitatif yang berbeza dan bertindih. Walaupun istilah "interseksionaliti" dicipta pada tahun 1989, akarnya sudah wujud sejak abad ke-19. Sojourner Truth, melalui ucapan terkenalnya "*Ain't I a Woman?*" (1851), telah mempersoalkan mengapa definisi "wanita" dalam gerakan feminis pada waktu itu hanya merujuk kepada wanita kulit putih yang kelas atasan, sementara wanita kulit hitam yang bekerja keras di ladang diabaikan. Pada tahun 1974, kumpulan feminis kulit hitam radikal, *Combahee River Collective*, mengeluarkan kenyataan yang menyatakan bahawa kehidupan wanita kulit hitam melibatkan sistem penindasan yang "bersepadu" (rasial, seksual, heteroseksual, dan kelas). Mereka menegaskan bahawa pembebasan satu kumpulan tidak akan berlaku tanpa menghancurkan semua sistem penindasan tersebut secara serentak. Tinjauan ini tidak lengkap tanpa membincangkan sumbangan **Kimberlé Crenshaw (1989)**. Crenshaw memperkenalkan metafora "persimpangan jalan" (*intersection*) untuk menjelaskan kedudukan undang-undang wanita kulit hitam. Jika berlaku kemalangan di persimpangan jalan, ia boleh disebabkan oleh kereta yang datang dari mana-mana arah (rasisme atau seksisme), atau gabungan kedua-duanya. Jika seorang wanita kulit hitam mengalami diskriminasi di tempat kerja, undang-undang sering kali gagal melindunginya jika dia tidak dapat membuktikan bahawa diskriminasi itu "hanya" kerana jantina atau "hanya" kerana kaum. Crenshaw menegaskan bahawa "ketiadaan nama" bagi pengalaman bertindih ini adalah satu bentuk kegagalan sistemik.

### 3.1.4. Tiga Dimensi Interseksionaliti

Crenshaw membahagikan interseksionaliti kepada tiga dimensi utama:

1. **Interseksionaliti Struktural:** Bagaimana lokasi sosial (misalnya status imigresen dan jantina) menjadikan pengalaman keganasan domestik berbeza bagi wanita imigresen berbanding wanita warga negara.
2. **Interseksionaliti Politik:** Bagaimana gerakan politik (feminis vs anti-rasis) sering kali memaksa individu memilih satu identiti, yang akhirnya meminggirkan mereka yang berada di kedua-dua kelompok.
3. **Interseksionaliti Representasi:** Bagaimana media dan budaya popular menggambarkan (atau memadamkan) kewujudan wanita yang mempunyai identiti bertindih.

Patricia Hill Collins (1990) memperluaskan konsep ini melalui istilah "*Matrix of Domination*". Beliau berpendapat bahawa penindasan beroperasi pada tiga tahap:

- **Tahap Biografi Peribadi:** Pengalaman harian individu.
- **Tahap Komuniti Kumpulan:** Budaya dan nilai kelompok.
- **Tahap Institusi Sosial:** Sekolah, gereja, media, dan kerajaan.

Collins menegaskan bahawa setiap individu mempunyai kedudukan yang unik dalam matriks ini—seseorang mungkin menjadi penindas dalam satu konteks (misalnya kerana kelas ekonominya) tetapi menjadi tertindas dalam konteks lain (kerana jantinya).

### 3.1.5 Isu Global: Interseksionalitas di Luar Barat

Kritikan terhadap teori ini sering menyatakan bahawa ia terlalu "berpusatkan Amerika". Walau bagaimanapun, sarjana di Global South telah mengadaptasi teori ini untuk isu tempatan:

- **Di India:** Interseksionaliti digunakan untuk memahami hubungan antara kasta (*Dalit*) dan jantina.
- **Di Asia Tenggara:** Ia digunakan untuk membedah isu pekerja migran wanita yang menghadapi penindasan berdasarkan status kewarganegaraan, kelas pekerja, dan jantina.
- **Kecacatan (Disability):** Bagaimana wanita kurang upaya menghadapi halangan sistemik yang berbeza daripada lelaki kurang upaya atau wanita normal.

Dalam era VUCA, dasar yang "satu saiz untuk semua" tidak lagi berkesan. Interseksionaliti menuntut pembuat dasar untuk:

- Melihat data yang dipecahkan (*disaggregated data*) bukan hanya mengikut jantina, tetapi jantina-kaum-umur.
- Memastikan program bantuan sosial sampai kepada mereka yang paling terpinggir di "persimpangan" paling gelap.
- Dalam pendidikan, kurikulum harus mencerminkan kepelbagaian suara agar pelajar dari latar belakang bertindih merasa diwakili.

Teori ini tidak terlepas daripada kritikan. Sesetengah pihak menganggap interseksionaliti sebagai "politik identiti" yang memecahbelahkan masyarakat. Namun, sarjana interseksional berhujah bahawa mengenali perbezaan bukanlah untuk memecahbelahkan, tetapi untuk mencapai keadilan yang sebenar dengan tidak meninggalkan sesiapa pun di belakang. Interseksionalitas bukan sekadar teori akademik, ia adalah alat untuk keadilan sosial. Ia memaksa kita untuk melihat kerumitan manusia di luar label ringkas. Dengan memahami bahawa penindasan dan keistimewaan (*privilege*) saling bertautan, kita dapat membina gerakan sosial yang lebih inklusif dan berkesan.

## 3.2 PEMBAHASAN

Secara global, perempuan lebih mungkin hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh "Gender Wage Gap" (kesenjangan upah) dan beban kerja domestik yang tidak dibayar (*unpaid care work*). Jika perempuan diberikan partisipasi ekonomi yang setara, PDB global diperkirakan akan meningkat triliunan dolar. Namun, perempuan sering menghadapi beban ganda: bekerja di sektor publik sambil memikul tanggung jawab utama dalam pengasuhan anak dan rumah tangga. Data PBB menunjukkan bahwa selama krisis global (seperti pandemi COVID-19), angka kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, seksual, hingga kekerasan digital yang kian marak. Isu global juga mencakup perjuangan melawan pembedahan genital perempuan (FGM) dan pernikahan anak yang masih lazim di beberapa wilayah di Afrika, Timur

Tengah, dan Asia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menghambat potensi generasi muda perempuan secara global. Meskipun ada peningkatan jumlah pemimpin perempuan dunia, representasi perempuan di parlemen global masih jauh dari kuota 30%. Hambatan struktural dan stereotip media masih menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan cenderung lebih kolaboratif dan lebih fokus pada kebijakan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Representasi gender yang setara dalam politik menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Di negara berkembang, akses perempuan terhadap internet dan teknologi digital jauh lebih rendah daripada laki-laki. Ini membatasi akses mereka terhadap informasi, pendidikan daring, dan peluang ekonomi digital. Isu terbaru dalam gender global adalah algoritma AI yang sering kali mewarisi bias gender dari data yang ada. Jika pengembang teknologi didominasi oleh satu gender, produk teknologi yang dihasilkan berisiko memperkuat stereotip lama. Perempuan di komunitas agraris sering kali menjadi yang pertama terdampak oleh perubahan iklim karena peran mereka dalam mencari air dan pangan. Namun, mereka paling sedikit dilibatkan dalam kebijakan mitigasi iklim. Gerakan ini menghubungkan eksploitasi alam dengan penindasan terhadap perempuan. Isu global saat ini mendorong keterlibatan perempuan sebagai agen perubahan dalam pelestarian lingkungan. Tinjauan terhadap sejarah gerakan perempuan internasional menunjukkan pergeseran dari sekadar menuntut hak pilih menjadi menuntut keadilan struktural yang menyeluruh melalui poin kelima SDGs (*Gender Equality*). Gerakan modern seperti "*HeForShe*" menekankan bahwa kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa keterlibatan laki-laki. Mendekonstruksi "*Toxic Masculinity*" (maskulinitas beracun) menguntungkan baik laki-laki maupun perempuan.

#### 4. KESIMPULAN

Di beberapa belahan dunia, terdapat gerakan yang mencoba membatalkan kemajuan hak-hak gender dengan kedok perlindungan nilai-nilai tradisional. Ini merupakan tantangan serius bagi diplomasi internasional. Isu gender global bukan sekadar masalah moral, melainkan prasyarat bagi kemajuan peradaban. Dunia yang setara secara gender adalah dunia yang lebih kaya, lebih aman, dan lebih adil. Upaya ini memerlukan komitmen lintas negara, lintas budaya, dan lintas generasi. Isu global ini menuntut kita untuk melihat manusia bukan berdasarkan kategori biologisnya, tetapi berdasarkan potensi dan kontribusinya bagi kemanusiaan.

#### Rekomendasi Strategis dalam penelitian ini

1. Reformasi Hukum: Menghapus hukum diskriminatif di tingkat nasional.
2. Pendidikan Inklusif: Kurikulum yang mendekonstruksi stereotip sejak dini.
3. Infrastruktur Pendukung: Kebijakan cuti ayah (*paternity leave*) dan penitipan anak yang terjangkau.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Beauvoir, S. d. (1949). *The second sex*. Gallimard.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Collins, P. H. (1990). *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment*. Routledge.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). University of California Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Hooks, B. (2000). *Feminism is for everybody: Passionate politics*. South End Press.

ISSN: xxxx-xxxx

- UN Women. (2024). The gender snapshot 2024: Progress on the sustainable development goals. United Nations.
- Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. Blackwell Publishers.
- World Economic Forum. (2024). Global gender gap report 2024. World Economic Forum.